



Evaluasi Biaya Keluaran di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tanjungpinang Tahun 2019-2021

Sheka¹, Muhammad Iqbal Ariefandana², Agus Riansyah³

Universitas Maritim Raja Ali Haji

Email: shekaika17@gmail.com, cikibal99@gmail.com, rynsyh3@gmail.com

Kata kunci:	Abstrak
<i>Standar Cost, Budgeting, Output Cost, Evaluation</i>	KPPN Tanjungpinang has Filial services, Filial KPPN services are carrying out the tasks or activities of the KPPN front office which are placed in certain areas with certain criteria. With the condition of the Riau Islands Province which is in the form of islands, so that KPPN Tanjungpinang has the furthest or filial branch in Natuna Regency, with several outputs such as education in the context of preparing financial reports at the BUN level of authority; consultation on disbursement of funds; monitoring evaluation of competency development of KPA, PPK, PPSPM, Treasurer and Treasury Manager; and monitoring the evaluation of cash receipts and disbursements.

Pendahuluan

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam proses pengelolaan keuangan negara dilakukan reformasi di bidang pengetahuan keuangan negara (Negara, 2014). Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diatur dalam undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dan. undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara (Lediastuti & Subandijo, 2014; Taufik, 2008).

Pengelolaan dan pertanggungjawaban yang baik dan efisien, harus disertai dengan perencanaan dan penyusunan yang matang. Peraturan Menteri Keuangan nomor 136 tahun 2014 menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan rencana kerja anggaran kementerian negara/lembaga (RKA-K/L). Dalam penyusunan RKA-K/L, penganggaran berbasis kinerja menjadi salah satu pendekatan yang digunakan (Hesrini, 2015; Mulyono & Hertianti, 2019).

Penganggaran terpadu jangka menengah dan pelanggaran berbasis kinerja merupakan persyaratan dalam menyusun rencana kerja dan anggaran (Nelli, 2019). Penganggaran berbasis kinerja merupakan persyaratan dasar dalam menyusun anggaran sedangkan dua pernyataan lainnya merupakan persyaratan pendukung dalam upaya untuk menerapkan penganggaran yang berpatokan pada kinerja (Biswan & Grafitanti, 2021). Hal ini dikarenakan kerangka pengeluaran jangka menengah digunakan untuk mengatur aturan fisik secara berkesinambungan dan penyusunan anggaran terpadu digunakan untuk efisiensi alokasi anggaran (Parhusip, 2018).

Peraturan Pemerintah Nomor 90 tahun 2010 merupakan landasan hukum dalam menyusun RKA-K/L yang mana RKA-K/L disusun secara terstruktur dan dirinci didasarkan pada klasifikasi anggaran yang akan menjadi klasifikasi organisasi, klasifikasi fungsi, dan klasifikasi belanja. Selain itu penyusunan RKA-K/L juga disusun berdasarkan tiga instrumen yang terdiri dari standar biaya, operasi kerja, dan indikator kinerja. (Mahfudin, 2021).

Dalam rangka membandingkan antara biaya yang dikeluarkan dengan biaya yang ditetapkan diterapkan suatu standar biaya yang merupakan suatu bentuk pengendalian biaya keluaran dalam akuntansi biaya (Palupi et al., 2016). Standar biaya merupakan suatu patokan dasar dalam penyusunan anggaran yang digunakan oleh setiap satuan kerja yang berada di bawah kewenangan kementerian negara/lembaga (Armala, 2020). Sebagai pengelola fiskal Menteri Keuangan menetapkan standar biaya sebagai suatu standar biaya masukan dan standar biaya keluaran yang akan memperhitungkan kebutuhan anggaran dalam penyusunan RKA-KL (Rajan, 2015, p. 263).

Dasar dari penyusunan RKA-KL yang berbasis kinerja merupakan tugas dari standar biaya keluaran yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas Efisiensi dan efektivitas guna menekan setiap penggunaan uang negara yang memiliki nilai dan manfaat yang terukur (Soderi, 2017). Yang dimaksud dengan Standar Biaya Keluaran (SBK) ialah suatu besaran nilai yang ditetapkan untuk menghasilkan keluaran (*output*). SBK digolongkan menjadi dua yaitu Indeks Biaya Keluaran (IBK) dan Total Biaya Keluaran (TBK) (Sriami). SBK difungsikan dalam rangka untuk realisasikan keuangan negara yang efisien efektif transparan bertanggung jawab yang berpatokan pada peraturan hukum. (Taufik, 2008)

Kantor Pelayanan perbendaharaan negara dipilih menjadi objek penelitian didasari oleh beberapa output yang ada di KPPN Tanjungpinang seperti layanan pelaksanaan kuasa pun di daerah laporan keuangan tingkat kuasa pun layanan sarana dan prasarana internal dan layanan perkantoran tetapi tidak menerapkan SBK. Penyusunan laporan keuangan tingkat kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) merupakan salah satu biaya keluaran rutin yang terdapat dalam laporan kertas kerja KPPN Tanjungpinang dari tahun 2019 hingga 2021.

Dengan adanya keluaran yang secara rutin dilaksanakan tiap tahunnya, sehingga KPPN Tanjungpinang dapat mengusulkan untuk penerapan Standar Biaya Keluaran dibandingkan harus menyusun Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dari masukan (*input*) setiap tahunnya. Hal ini juga mempermudah KPPN Tanjungpinang dalam menyusun perencanaan dan penganggaran sekaligus menghemat waktu agar lebih efisien. Sehingga untuk tahun berikutnya, keluaran tersebut tidak perlu dijabarkan lagi hingga detil, hanya menggunakan Standar Biaya Keluaran yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan evaluasi serta merancang biaya keluaran KPPN Tanjungpinang.

Metode

Pada penulisan karya tulis tugas Dakhir ini akan digunakan pendekatan penelitian berupa penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif diambil karena penulis akan melakukan pengamatan yang mendalam.

Jenis data yang akan digunakan yaitu dokumen RKA-K/L Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tanjungpinang Tahun Anggaran 2019-2021 Sumber dari data ini didapat dari objek atau disebut juga dengan data primer Data primer digunakan dalam rangka untuk menghasilkan suatu keputusan yang berguna untuk objek informasi yang didapatkan merupakan kondisi langsung dari lapangan (Pramiyati et al., 2017).

1. Studi Lapangan
 - a. Wawancara

Dalam melakukan metode wawancara penulis berhadapan langsung dengan narasumber yang berkaitan dengan objek yang diteliti sehingga dapat memperoleh informasi secara akurat. Metode wawancara dilakukan dalam upaya untuk melengkapi data yang dibutuhkan sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk langkah berikutnya dalam menyusun penelitian ini (Edi, 2016; Soegijono, 1993).

b. Observasi

Metode studi lapangan dilakukan dengan cara melakukan observasi yang mana observasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati secara langsung ke lapangan. Observasi dilakukan dengan cara mengakses data Kertas Kerja RKA-K/L Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tahun Anggaran 2019-2021, Sebagai bahan referensi tambahan dapat digunakan pula peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar biaya keluaran serta Peraturan Menteri Keuangan tentang standar biaya Keluaran dan dokumen-dokumen yang lain yang terkait dengan penganggaran berbasis kinerja Selain itu dalam penelitian ini pengolahan data akan dilakukan menggunakan metode logic model (Lestari, 2017)

Logic Model atau logika model merupakan representasi grafis dari sebuah program yang menunjukkan hubungan antara data dan hasil (Taylor-Powell & Henert, 2008). Dengan logika model akan menggambarkan rangkaian hubungan yang menghubungkan data-data dengan hasil yang mewakili teori perubahan. Ketika logic model telah dibuat, perubahan dan perkembangan dapat terus terjadi selama evolusi program (Van Koperen et al., 2013).

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan sumber-sumber tertulis (Aminati, 2013; Sriami, n.d.). Contoh sumber-sumber tertulis yaitu buku, jurnal ilmiah, rincian kertas kerja satker pada dokumen RKA-K/L, bahan perkuliahan dan sumber-sumber lain yang berisikan data dan fakta untuk mencegah terjadinya duplikasi data selama proses penyusunan karya tulis tugas akhir.

Studi kepustakaan digunakan untuk melihat hubungan antara latar belakang dan kajian teoritis yang dibahas dalam karya tulis ini. Dokumen dari studi kepustakaan yang akan digunakan selama proses penyusunan karya tulis tugas akhir yaitu dokumen RKA-K/L Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tanjungpinang Tahun Anggaran 2019-2021, Peraturan perundang-undangan yang berisi mengenai aturan penetapan standar biaya keluaran serta Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai standar biaya keluaran dalam dokumen RKA-KL, dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penganggaran berbasis kinerja serta dapat digunakan sebagai referensi tambahan dalam penyusunan karya tulis tugas akhir ini. (Swandana, 2017)

Hasil dan Pembahasan

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Tanjungpinang belum pernah menerapkan Standar Biaya Keluaran hingga saat ini. Sehingga dalam pembahasan ini, Dalam penelitian ini penulis akan menggambarkan Bagaimana penyusunan standar biaya keluaran yang dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi usulan standar biaya keluaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Tanjungpinang kepada Direktorat Jenderal Anggaran. Simulasi penyusunan standar biaya keluaran ini akan disusun menggunakan logic model dengan pendekatan penerapan standar biaya masukan pada rentang tahun 2019 hingga 2021 berdasarkan yang tertera pada Rincian Kertas Kerja KPPN Tanjungpinang.

1. Komponen/Tahapan serta Detil Biaya Keluaran

Klasifikasi biaya pada tiap-tiap komponen/tahapan sangat diperlukan, komponen/tahapan harus Harus digolongkan menjadi dua bagian yang merupakan biaya

utama dan biaya pendukung. Hal ini dilakukan dalam upaya untuk mengetahui presentase kedua golongan biaya tersebut biaya utama merupakan suatu biaya Komponen yang dapat mempengaruhi secara langsung volume biaya keluaran sedangkan biaya pendukung merupakan suatu biaya komponen yang tidak dapat mempengaruhi secara langsung biaya volume keluaran (Miller, 2018). Sedangkan untuk biaya pendukung merupakan biaya komponen yang tidak berpengaruh langsung terhadap volume keluaran. Komponen/tahapan harus beruntun, sehingga tidak terjadi timpang tindih dari tiap tahapan. Selain itu komponen tahapan juga menggambarkan fungsi manajemen (Arliman, 2020).

a. Proses Perencanaan

Pada proses penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN diperlukan perencanaan yang matang. Dengan menerapkan fungsi manajemen yaitu proses perencanaan (Planning) akan memudahkan penyusunan laporan keuangan. Perencanaan dalam fungsi manajemen adalah sejumlah kegiatan yang telah ditentukan tujuannya beserta dengan strategi utama maupun alternatif untuk mencapainya (Talibo, 2018). Perencanaan dalam fungsi manajemen sangat penting, karena merupakan langkah awal yang dapat mempengaruhi proses berikutnya (Muliawan, 2017)

Proses perencanaan dalam penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN dilakukan dengan berkoordinasi atau berkonsultasi dengan melaksanakan rapat antara KPPN Tanjungpinang dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Pada saat ini KPPN Tanjungpinang dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau bertempat di satu gedung yang sama, oleh karena itu tidak diperlukan perjalanan dinas.

Hanya satu pegawai KPPN yang dapat terlibat dalam rapat penyusunan laporan keuangan tingkat kuasa BUN. Oleh karena itu, jumlah volume dalam alokasi anggaran untuk belanja bahan konsumsi peserta KPPN Tanjungpinang dalam kegiatan perencanaan adalah satu orang satu hari satu kegiatan.

Menurut peraturan Menteri Keuangan nomor 60 tahun 2021 maka standar bayam masukan terhadap Tahun Anggaran 2022 pelaksanaan rapat yang harusnya dilaksanakan secara lebih dari 2 jam harus mendapatkan makanan dan minuman. Uang makan yang diberikan yaitu sebesar Rp40.000, biaya tersebut sudah termasuk makanan serta minuman. Rincian biaya seperti pada Tabel 1.

b. Proses Pelaksanaan

KPPN melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis yang berisi tentang edukasi dalam upaya untuk mengedukasi Bagaimana penyusunan laporan keuangan tingkat kuasa BUN yang dilakukan secara luring. Upaya ini dilakukan dalam rangka untuk mempermudah proses pelaksanaanPelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis dilakukan dalam rangka untuk menyusun laporan keuangan tingkat kuasa BUN (Bastian, 2006)

Pelaksanaanya dibutuhkan sebanyak dua kali karena dilaksanakan di Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Natuna. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah proses pelaksanaan, agar satker mampu menyusun transaksi per aplikasi (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara atau SIMAK BMN dan Aplikasi Saiba) dan melaksanakan rekon internal antar aplikasi serta memastikan setiap laporan neraca antar aplikasi tidak ada selisih.

Pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN melibatkan seluruh satker yang berada di lingkup kerja KPPN Tanjungpinang. Jumlah satker yang dikelola oleh KPPN Tanjungpinang sebanyak 198. Setiap satker mengirim perwakilan sebanyak 2 orang. Oleh karena itu, jumlah volume dalam alokasi anggaran untuk belanja bahan konsumsi peserta KPPN Tanjungpinang dalam kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis ini adalah dua kali 198 satker. Selain itu, pelaksanaan

sosialisasi dan bimbingan teknis ini juga melibatkan narasumber dan panitia sebanyak 15 pegawai.

Berdasarkan SBM tahun anggaran 2022 yang telah diatur pada PMK Nomor 60 Tahun 2021 pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis dilaksanakan secara luring. Setiap peserta diberikan kudapan sebesar Rp10.000. Sementara itu untuk narasumber dan panitia diberikan makanan serta minuman yaitu sebesar Rp50.000, biaya tersebut sudah termasuk makanan dan minuman serta kudapan.

Alokasi anggaran kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis untuk konsumsi peserta satker (198 STKR x 2 ORG x 2 KEG x 10.000) hasilnya Rp7.920.000. Sedangkan untuk narasumber dan panitia berjumlah 15 orang, dengan uang konsumsi sebesar Rp50.000. Maka alokasi anggarannya (15 ORG x 2 KEG x 50.000) hasilnya Rp1.500.000.

Selain konsumsi peserta, panitia, dan narasumber sosialisasi dan bimbingan teknis pada pelaksanaan juga membutuhkan Alat Tulis Kantor (ATK) dan bahan habis pakai. Berhubungan KPPN Tanjungpinang termasuk KPPN Tipe A1, maka untuk ATK dan Bahan Habis Pakai sebesar Rp1.500.000. dan dilaksanakan sebanyak dua waktu maka (2 KEG x 1.500.000) hasilnya Rp3.000.000. Sehingga jumlah akhir biaya keluaran untuk edukasi dalam rangka penyusunan tingkat kuasa BUN yaitu Rp12.420.000 seperti pada Tabel 2.

c. Proses *Monitoring* dan Evaluasi

Pada proses terakhir menyusun keluaran Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN yaitu melakukan *monitoring* dan evaluasi. Keluaran tersebut di KPPN Tanjungpinang termasuk dalam karakteristik biaya utama, karena menentukan hasil akhir dari laporan keuangan tersebut.

Pada proses *monitoring* dan evaluasi KPPN melakukan rekonsiliasi internal dengan tujuan agar tidak ada selisih antara KPPN dengan satker yang dikelola. Rekonsiliasi dilakukan pada Aplikasi SiAP (Sistem Aplikasi Pusat) dan Aplikasi SAI (Sistem Aplikasi Instansi). Setelah proses rekonsiliasi selesai di semua satker, KPPN menyusun Laporan Keuangan BUN Daerah yang terdiri dari neraca dan LAK dari SPAN GL (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara General Ledger) dan CALK (Catatan Akuntansi Laporan Keuangan) berdasarkan Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan BUN Daerah yang telah disusun dilanjutkan untuk dilakukan penelaahan. Penelaahan laporan menghasilkan temuan dan catatan yang dilampirkan sebagai penjelasan pendukung. Laporan Keuangan BUN Daerah serta lampiran disampaikan ke Kanwil DJPb akan dikonsolidasi menjadi Laporan Keuangan BUN wilayah sampai ke tingkat eselon dan kementerian keuangan.

Seluruh proses *monitoring* dan evaluasi dilaksanakan secara tahunan. Oleh karena itu, untuk klasifikasi biaya dihitung secara kumulatif selama setahun sebesar 1.500.000. Biaya tersebut dikarenakan KPPN Tanjungpinang termasuk KPPN Tipe A1, seperti pada Tabel 3.

2. Standar Biaya Keluaran

a. Kriteria Penyusunan Standar Biaya Keluaran

i. *Output* Kegiatan yang Bersifat Berulang

Terdapat beberapa keluaran KPPN yang dilakukan secara rutin setiap tahunnya seperti laporan keuangan tingkat pos sabun layanan sarana dan prasarana internal serta layanan perkantoran sedangkan ada dua keluaran yang tidak dilakukan secara rutin, seperti pada Tabel 4.

ii. *Output* Kegiatan Mempunyai Jenis dan Satuan yang Jelas dan Terukur

Dari keluaran yang dilaksanakan secara rutin oleh KPPN Tanjungpinang, Semuanya telah digolongkan menjadi satuan yang jelas dan terarah. Untuk laporan keuangan tingkat kuasa BUN mempunyai satuan berupa laporan, sedangkan untuk layanan sarana dan

prasarana internal serta layanan perkantoran mempunyai satuan berupa layanan. Pada tahun 2021 untuk layanan sarana dan prasarana internal dan layanan perkantoran tidak menggunakan satuan berupa layanan, melainkan satuan yang lainnya seperti pada Tabel 5.

Dari tiga keluaran yang ada laporan keuangan tingkat kuasa BUN masih konsisten menggunakan satuan laporan untuk satuan ukur keluaran. Sedangkan untuk layanan sarana dan prasarana internal satuan ukur keluaran berubah menjadi unit, serta untuk layanan perkantoran satuan ukur keluaran berubah menjadi orang.

iii. *Output* Kegiatan Mempunyai Komponen/Tahapan yang Jelas

Komponen/tahapan untuk keluaran laporan keuangan tingkat kuasa BUN sangat jelas, serta tahapan keluaran telah menggambarkan fungsi manajemen. Tabel 6 merupakan rincian dari komponen/tahapan keluaran penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN.

b. Rancangan Standar Biaya Keluaran

Dengan rentang tahun 2019-2021 KPPN Tanjungpinang telah banyak melakukan evaluasi untung merancang biaya keluaran. Penerapan layanan filial di Kabupaten Natuna merupakan bentuk evaluasi biaya keluaran, karena akses yang sukar menuju daerah tersebut. Tidak hanya akses yang sukar menuju Kabupaten Natuna, Di wilayah tersebut tidak terdapat fasilitas serta jaringan internet yang oleh karenanya, diperlukan layanan filial di Kabupaten Natuna serta jumlah satker yang ada di Kabupaten Natuna tidak sedikit yaitu berjumlah 26 satker.

Dengan perbandingan satker yang berada di Kabupaten Natuna berangkat ke Kota Tanjungpinang dengan biaya yang lebih besar, maka lebih baik KPPN Tanjungpinang mengirimkan perwakilannya ke Kabupaten Natuna. Besaran biaya keluaran KPPN Tanjungpinang untuk laporan keuangan tingkat kuasa BUN adalah Rp13.961.000 seperti pada Tabel 7.

Kesimpulan

Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini bertujuan untuk melakukan evaluasi serta merancang biaya keluaran KPPN Tanjungpinang untuk keluaran Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN. Berdasarkan data, fakta, dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya terkait evaluasi dan merancang biaya keluaran KPPN Tanjungpinang dapat disimpulkan untuk keluaran tersebut dapat di usulkan menjadi standar biaya keluaran KPPN Tanjungpinang.

Penyusunan laporan keuangan tingkat kuasa BUN dilakukan secara rutin setiap tahunnya dan memiliki satuan ukur yang jelas serta memiliki tahapan yang jelas. Pengusulan standar biaya keluaran dapat dilakukan karena telah memenuhi kriteria untuk penerapan standar biaya keluaran. Sementara itu untuk besaran biaya keluaran KPPN Tanjungpinang untuk laporan keuangan tingkat kuasa BUN adalah Rp13.961.000. Angka tersebut dapat dijadikan batas tertinggi dari penerapan SBK.

Daftar Pustaka

- Aminati, A. Y. (2013). Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori dan Praktik Konseling Resolusi Konflik Interpersonal. *Jurnal BK Unesa*, 3(1).
- Arliman, L. (2020). Makna Keuangan Negara Dalam Pasal Pasal 23 E Undang-Undang Dasar 1945. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 189–201.
- Armala, S. (2020). Implementasi PP No. 90 Tahun 2010 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Pada Direktorat Bandar Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. *JURNAL EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS*,

DAN SOSIAL, 1(1), 11–21.

- Atmaja, R. M. T. E., Harun, C. Z., & Ibrahim, S. (2016). Analisis Penetapan Standar Biaya Pendidikan Pada SMA Negeri 2 Kuala Kabupaten Nagan Raya. *Jurnal Administrasi Pendidikan: Program Pascasarjana Unsyiah*, 4(1).
- Bastian, I. (2006). Sistem Akuntansi Sektor Publik, Edisi Kedua. *Salemba Empat*. Jakarta.
- Biswan, A. T., & Grafitanti, I. D. (2021). Memaknai Kembali Penganggaran Berbasis Kinerja Berdasarkan Studi Implementasi Penganggaran Sektor Publik. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 2(1), 35–56.
- Edi, F. R. S. (2016). *teori wawancara Psikodignostik*. Penerbit LeutikaPrio.
- Hesrini, E. (2015). Analisis Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Gresik. *E-Jurnal Ilmu Manajemen MAGISTRA*, E-ISSN, 2442–4315.
- Lediastuti, V., & Subandijo, U. (2014). Audit Forensik Terhadap Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Studi Kasus Pada Badan Pemeriksa Keuangan RI). *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 1(1), 89–108.
- Lestari, N. A. (2017). Metode *Monitoring* dan Evaluasi Standar Biaya Keluaran. *Jurnal Anggaran Dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI)*, 1(2), 16.
- Mahfudin, M. (2021). Pengembangan Kebijakan Standar Biaya Masukan (SBM): Biaya Konsumsi Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan. *Jurnal Anggaran Dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI)*, 3(2), 73–91.
- Miller, G. (2018). *Performance based budgeting*. Routledge.
- Muliawan, Y. (2017). Analisis Kebutuhan Pengaturan Billing Rate oleh Menteri Keuangan. *Jurnal Anggaran Dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI)*, 1(1), 19.
- Nelli, N. (2019). Evaluasi Penerapan Pendekatan Anggaran Terpadu dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Dalam Mendukung Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja Pada Pemerintah DKI Jakarta. *Jurnal STEI*.
- Palupi, T. A., Zahroh, Z. A., & NP, M. G. W. E. (2016). *Analisis Biaya Standar untuk Mendukung Efisiensi Biaya Produksi Perusahaan (Studi pada Pabrik Gula Lestari, Patianrowo, Nganjuk)*. Brawijaya University.
- Parhusip, B. (2018). Implementasi Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) di Indonesia. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 1(1), 958–977.
- Pramiyati, T., Jayanta, J., & Yulnelly, Y. (2017). Peran Data Primer Pada Pembentukan Skema Konseptual Yang Faktual (Studi Kasus: Skema Konseptual Basisdata Simbumil). *Simetris: Jurnal Teknik Mesin, Elektro Dan Ilmu Komputer*, 8(2), 679–686.
- Rajan, C. T. H. S. M. D. dan M. V. (2015). *Cost Accounting A Managerial Emphasis Fifteenth Edition*. Pearson.
- Soderi, S. (2017). Penggunaan Standar Biaya Keluaran Pada RKA-KL Pagu Anggaran Tahun 2016. *Forum Ilmiah Keuangan Negara*, 4(1), 9.
- Soegijono, M. S. (1993). Wawancara sebagai salah satu metode pengumpulan data. *Media Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan*, 3(1), 157152.
- Sriami, S. (n.d.). *Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori dan Praktik Acceptance and Commitment Therapy (Act)*. State University of Surabaya.
- Swandana, A. A. N. (2017). Kajian Standar Struktur Biaya. *Jurnal Anggaran Dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI)*, 1(1), 9.
- Taufik, T. (2008). Pengelolaan Keuangan Desa dalam Sistem Keuangan Negara Republik Indonesia. *Jurnal Ekonomi*, 17(01).
- Taylor-Powell, E., & Henert, E. (2008). Developing a logic model: Teaching and training guide. *Benefits*, 3(22), 1–118.

Van Koperen, T. M., Jebb, S. A., Summerbell, C. D., Visscher, T. L. S., Romon, M., Borys, J. M., & Seidell, J. C. (2013). Characterizing the EPODE logic model: unravelling the past and informing the future. *Obesity Reviews*, *14*(2), 162–170.